

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Oleh:

Hotlarisda Girsang¹

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) semakin meningkat dari hari ke hari dengan modus yang semakin berkembang. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum dapat digunakan untuk menjerat para pelaku. Undang-undang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan paradigma bahwa hasil dari kejahatan merupakan “blood of the crime”, dapat digunakan sebagai senjata bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui pendekatan analisis keuangan (financial analysis) yang meliputi penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan analisis transaksi mencurigakan, kemudian Penerapan Perluasan Pihak Pelapor.

Kata Kunci : Tinda Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

A. Pendahuluan

Salah satu fungsi hukum dinyatakan adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia.² Efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum. Hukum menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum sebagai pengendali perilakunya. Hukum diharapkan mampu menjadi pengendali perilaku masyarakat, terlebih lagi di era perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini, karena seiring dengan perkembangan teknologi maka disisi lain kejahatan jugaikut berkembang.

Dalam pergaulan kehidupan masyarakat banyak ditemui konflik. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu masyarakat yang tanpa konflik merupakan masyarakat yang mati, atau hanya merupakan masyarakat berdasarkan angan-

¹ Staf Pengajar pada Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua.

² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, “*Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*”, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 1

angan saja.³ Dalam hal terjadi konflik atau peristiwa konkrit berupa pelanggaran hukum, maka hukum itu harus kembali ditegakkan.

Salah satu bentuk konflik yang ditemui dalam masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang dapat dikategorikan sebagai “perbudakan modern”. Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah merupakan persoalan global sangat serius⁴, yang juga merupakan permasalahan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki kebebasan, dengan harkat dan martabat yang sederajat, serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu pasalnya menyebutkan mengenai “hak untuk tidak diperbudak”.⁵ Untuk mewujudkan perlindungan hak tersebut, maka Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengaturan tersendiri mengenai tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Perdagangan orang (*human trafficking*) bukan merupakan bentuk kejahatan yang baru dikenal. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yaitu melalui perbudakan atau perhambaan. Pada masa kerajaan, perdagangan perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal.⁶ Perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang pesat pada masa penjajahan Belanda, hal ini terlihat dari adanya perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang ini dapat berbentuk kerja rodi, penjualan anak perempuan untuk mendapatkan

³ Soerjono Soekanto, “*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*”, (Jakarta: UI-Press, 1983), hal. 4

⁴ Karen E. Bravo, “*Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries for Freedom*,” Article, (Westlaw: University of St. Thomas Law Journal, 2009), hal. 2

⁵ UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), hasil amandemen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000

⁶ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 1, pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang bersifat agung dan mulia, kekuasaan raja tidak terbatas, sehingga raja bebas memiliki selir yang banyak. Selir-selir ini sebahagian merupakan putri-putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, selain itu ada juga sebagai persembahan dari kerajaan lain, dan ada juga yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana.

imbalan materi dan kawin kontrak.⁷ Demikian juga halnya dengan masa penjajahan Jepang.⁸

Pada awal perkembangannya perdagangan orang belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, pada masa kemerdekaan perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Pemerintah Indonesia mengkriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang, dalam pasal itu dinyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Pasal-pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *human trafficking* (perdagangan orang) adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP. Pengaturan dalam KUHP masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus baru perdagangan orang, kemudian hal ini terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat diberantas. aparat hukum masih belum bisa memaksimalkan perannya dalam memberantas perdagangan orang. Hal ini dapat terjadi karena ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku perdagangan orang di Indonesia. Akibatnya kasus perdagangan orang bukannya dapat diatasi tetapi sebaliknya makin meningkat.

Peningkatan ini juga terjadi karena beberapa faktor seperti adanya kelemahan pada perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) dan juga adanya faktor-faktor di luar peraturan perundang-undangan. Kelemahan pada

⁷ *Ibid.*, hal. 2

⁸ *Ibid.*, hal. 3, pada masa ini Jepang bukan hanya memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, tetapi Jepang juga membawa perempuan dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong ke Jawa untuk melayani Perwira Tinggi Jepang.

perangkat hukum disebabkan adanya peraturan yang sulit untuk diterapkan pada kasus-kasus *human trafficking* yang ditangani oleh aparat penegak hukum.⁹

Faktor-faktor di luar peraturan perundang-undangan misalnya adanya pandangan masyarakat tentang perempuan yang menganggap bahwa bila ada kejahatan yang terjadi pada dirinya, maka hal itu merupakan kesalahannya sendiri. Selain itu ada juga pandangan masyarakat yang enggan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, alasan lainnya ada kecenderungan paradigma pemerintah yang memandang tenaga kerja sebagai komoditi penghasil devisa negara, kemudian adanya faktor-faktor sosial yang berkembang di masyarakat, misalnya masih adanya diskriminasi terhadap perempuan. Ada juga kelemahan yang datang dari aparat penegak hukum yang disebabkan ketidaktahuan mereka tentang masalah *trafficking* (perdagangan orang).¹⁰ Menghadapi kondisi ini, maka diperlukan kebijakan yang lebih dapat mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, penanggulangan, dan penegakan hukum atas tindak pidana perdagangan orang.

Paradigma baru dalam penegakan hukum yang menyatakan bahwa hasil dari kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan “*blood of the crime*”, artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik lemah dari mata rantai kejahatan.¹¹ Hal ini berarti bahwa orientasi pemberantasan tindak pidana beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Paradigma ini dianut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berpangkal tolak dari latar belakang maka akan dikaji bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat digunakan sebagai alat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

⁹ *Ibid.*, hal. 137

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Bismar Nasution, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, (Bandung: BookTerrace & Library), 2008, hal. 11

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah *money laundering* diterjemahkan dengan “pencucian uang” atau “pemutihan uang”. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkoba, korupsi dan penyuapan, perdagangan orang, penyelundupan tenaga kerja, penipuan, penggelapan, terorisme dan lain sebagainya.¹²

Menurut Jeffrey Robinson dalam Sutan Remy Sjahdeini,¹³

“Money laundering is called what it is because that perfectly describes what takes place-illegal, or duty, money is put through a cycle of a transactions or washed, so that it come out the other end as legal, or clean money. In the words, the sources of illegally obtained funds is obscured through a sucession of transfers and deals in order that those same funds can eventually be made to reappear as legitimate in come.”

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendefinisikan pencucian uang sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime*,¹⁴ maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai hasil usaha yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tidak memberikan definisi pencucian uang secara langsung. Hal ini berbeda

¹²Adrian Sutedi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 132

¹³Sutan Remy Sjahdeini, “Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme”, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), hal. 6

¹⁴United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Pasal 1, disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi adalah suatu kelompok terstruktur, dalam waktu tertentu, dan bertindak untuk tujuan tertentu dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan atau pelanggaran yang serius, yang dari kejahatan atau pelanggaran itu mereka mendapat manfaat langsung atau pun tidak langsung.

¹⁵Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi Penyedia Jasa Keuangan, Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003, Bab. 2 bagian 1 butir (1)

dengan undang-undang yang terdahulu yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 pada Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa :

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana baik tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan orang dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana, sehingga akhirnya nanti akan muncul seolah-olah harta kekayaan yang sah. Kemudian dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.¹⁶

Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang menghasilkan (*proceeds of crime*), memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan ke dalam bisnis yang sah.¹⁷ Melalui proses kejahatan *money laundering*, pelaku mengharapkan uang yang semula adalah merupakan uang haram (*dirty*

¹⁶Hikmahanto Juwana, “*Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum, 2005), hal. 71

¹⁷ Yunus Husein, “*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*”, (http://yunushusein.files-ordpress.com/2007/07/12_penegahan_pemberantasan-tpu-di-indonesia_x.pdf diakses tanggal 6 September 2012), hal. 8

money) diproses sehingga menghasilkan uang bersih (*clean money*) atau uang halal (*legitimate money*).¹⁸

Proses pencucian uang ini dapat juga disebutkan sebagai upaya penyesatan.¹⁹ Dengan cara ini maka kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindakan ini akan selalu berkembang dari waktu ke waktu terlebih lagi dengan dukungan kemajuan teknologi dan sistem keuangan yang rumit.

2. Tujuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkembangan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada penegakan hukum.²⁰ Banyak pihak yang mengakui bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum memenuhi harapan, baik mengenai profesionalisme aparat penegak hukum maupun mengenai perangkat peraturan perundang-undangan.²¹ Upaya untuk memenuhi tuntutan pembaharuan peraturan perundang-undangan itu, maka pemerintah Indonesia terus melakukan

¹⁸ John Madinger and Sydney A. Zalopany, *Money Laundering A Guide For Criminal Investigators*, United State: CRC Press LLC, 1999), hal. 13

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 14

²⁰ Satjipto Raharjo, "*Membedah Hukum Progresif*", (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal.122-124, "bahwa penegakan hukum perlu dibedakan antara peraturan (gezet, wet, rule) dan kaidah (recht, norm). Apabila kita membaca undang-undang, pertama yang dibaca adalah peraturan pasal-pasal. Berhenti pada pembacaan undang-undang sebagai peraturan bisa menimbulkan kesalahan besar karena kaidah yang mendasari peraturan itu menjadi terlupakan. Kaidah itu adalah makna spiritual, roh, sedangkan peraturan adalah penterjemahannya pada kata-kata dan kalimat.....membaca kaidah, bukan peraturan, adalah pedoman yang baik dalam penegakan hukum. Membaca kaidah adalah menyelam kedalam roh, azas, dan tujuan hukum. Ini membutuhkan perenungan."

²¹ Ibid, hal. 60-61, kompleksnya permasalahan penegakan hukum sudah mulai disadari orang sejak pertengahan abad ke-20, bahwa penegakan hukum bukanlah seperti menarik garis lurus antara "dua titik", karena penegakan hukum tidak hanya semata-mata menyangkut prinsip "peraturan dan logika" (*rules and logic*). Hasil-hasil penelitian lapangan membuktikan bahwa banyak faktor-faktor di luar hukum yang turut menentukan bagaimana hukum senyatanya dijalankan. Misalnya, ketika polisi dan kejaksaan melakukan penahanan, ternyata banyak faktor yang terlibat didalamnya sehingga memerlukan informasi yang luas mengenai "sosiologi penahanan" (*the sociology of arrest*). Penelitian di amerika Serikat membuktikan bahwa faktor ras, stratifikasi sosial, kedekatan hubungan, sikap sopan tersangka dan sebagainya ikut menentukan bahwa dalam proses penahanan seseorang.

pengkajian ulang kebijakan formulasi perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Dasar filosofi pemikiran perlunya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang TPPU adalah Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai norma filosofis negara dan merupakan sumber cita hukum.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945²² dalam pembukaannya menyebutkan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dasar sosiologis dari upaya penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bahwa selama ini penegakan hukum di bidang pencucian uang belum berjalan maksimal. Penyebabnya bisa berasal dari pihak masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan, dari pihak penyedia jasa keuangan, penyedia barang/jasa, demikian juga aparat penegak hukum, maupun dari segi perangkat peraturan hukumnya.

Dasar yuridis dari upaya penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kesadaran bahwa masih adanya kelemahan dalam pengaturan dan penegakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena adanya multi interpretasi terhadap rumusan delik pencucian uang, masih banyak kekurangtegasan rumusan mengenai pemberian sanksi atau ancaman hukuman yang diyakini sebagai salah satu penyebab kurang efektifnya pelaksanaan dan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.²³

Selain itu juga juga dipicu oleh perkembangan atau telah berubahnya standard internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang

²² Pasal 1 ayat (3) Bab I, amandemen ketiga UUD 1945 menegaskan kembali bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan yang tidak terbatas (*absolutisme*), sebagai konsekuensinya terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara Indonesia yaitu: supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri.

²³ Naskah Akademik, *RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2006., hal. 19-20

diakui oleh masyarakat internasional dan dikenal dengan sebutan *FATF*²⁴ *Revised 40+9 Recs (Financial Action Task Force on Money Laundering Revised 40 Recommendations and 9 Special Recommendations)*.

FATF Revised 40+9 Recs yang merupakan *standard setter* dalam merumuskan dan mengukur efektifitas kebijakan suatu negara di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di dunia. Standard internasional terbaru tersebut dikeluarkan sebagai reaksi atas berbagai praktek pencucian uang yang semakin kompleks dan meluas hingga menjamah lembaga-lembaga di luar sistem keuangan sebagai “*modus operandi*” terkini dalam pencucian uang.

Salah satu isi dari rekomendasi itu adalah tuntutan perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transaction report*) dan tuntutan nya adalah memasukkan profesi dalam kategori pihak pelapor yaitu pengacara, notaris, profesi hukum lainnya, akuntan publik, pedagang barang-barang berharga dan perhiasan, serta lembaga profesi lainnya.

Tuntutan ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat internasional sangat besar terhadap aktivitas pencucian uang, selain itu juga karena kesadaran akan akibat buruk dari pencucian uang itu sendiri. Sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih kompleks untuk menjamin

²⁴ FATF dibentuk pada tahun 1989 oleh negara-negara yang bergabung dalam G-7 countries. FAFT merupakan *intergovernmental body* sekaligus *policy making body* yang berisikan para pakar hukum, keuangan dan penegakan hukum yang membantu yurisdiksi negara dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ada 3 (tiga) fungsi utama dari FAFT yaitu : memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FAFT dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *money laundering*, melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques dan counter measures*, dan mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standart anti pencucian uang kepada masyarakat internasional. Pada tahun 1990, FAFT untuk pertama kalinya mengeluarkan 40 *recommendations* sebagai suatu kerangka yang komprehensif untuk memerangi *money laundering*. Sebagai reaksi atas tragedi WTC atau yang dikenal dengan peristiwa 11 September 2001. Bulan Oktober 2001 FAFT mengeluarkan 8 *special recommendations* untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan *counter terrorist financing 40+8 recommendations* menetapkan prinsip-prinsip untuk menyusun kebijakan implementasi oleh setiap negara. Pada tanggal 22 Juni 2003, FAFT mengeluarkan *revised 40 recommendations* pada bulan Oktober 2004 mengeluarkan 9 *special recommendations* atas cash couriers. Meskipun *revised 40+9 recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional sebagai suatu standard internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

tercapainya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui pendekatan anti pencucian uang (*anti-money laundering strategy*). Dengan pendekatan anti pencucian uang ini, pengungkapan tindak pidana dan pelakunya dilakukan melalui penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*). Penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana merupakan cara yang paling mudah untuk memastikan terjadinya kejahatan, menemukan pelakunya, dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan.²⁵

Pendekatan ini tidak terlepas dari pemikiran dan keyakinan bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan *life-blood of the crime*, artinya hasil kejahatan merupakan “darah” yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan.

Upaya memotong mata rantai kejahatan ini selain relatif mudah dilakukan, juga akan menghilangkan motivasi para pelaku untuk mengulangi kejahatan. Hilangnya motivasi tersebut karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya menjadi terhalang atau sulit dilakukan. Para pelaku kejahatan tidak memiliki kemampuan lagi untuk melanjutkan kegiatannya karena modalnya telah disita dan dirampas untuk kepentingan bangsa dan negara.²⁶

Dengan pendekatan *follow the money* ini, selain dapat menelusuri dan menyelamatkan aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara, dalam beberapa kasus, aliran dana yang berhubungan dengan suatu transaksi keuangan dapat pula menghubungkan suatu kejahatan dengan pelaku utamanya (*intellectual dader*), dimana dengan pendekatan konvensional (*follow the suspect*) hal tersebut sulit untuk dilakukan.

Dalam upaya memenuhi semua kebutuhan ini maka pemerintah terus berusaha untuk menciptakan aturan yang lebih baik. Semula tindak pidana

²⁵ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hal. 38

²⁶ *Ibid.*, hal 225

pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003. Dua undang-undang ini masih banyak memiliki kelemahan-kelemahan, dimana kemudian pemerintah berusaha mengeliminasi kelemahan-kelemahan itu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tujuan dari undang-undang ini adalah²⁷ :

1. memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan rezim anti tindak pidana pencucian uang di Indonesia
2. mendukung dan meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
3. memberi dasar hukum yang kuat dan kemudahan dalam pendeteksian, penafsiran dan penyitaan hasil kejahatan
4. menyesuaikan pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang dengan standar internasional yang telah mengalami perubahan serta ketentuan *anti-money laundering strategy* yang berlaku secara internasional sebagai *international best practice*
5. untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat baik dalam maupun luar negeri terhadap penegakan hukum di Indonesia dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah²⁸:

1. memelihara dan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional dari tindak pidana pencucian uang

²⁷ *Ibid.*, tujuan ini diadopsi dari tujuan penyusunan Rancangan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁸ *Ibid.*, sasaran ini diadopsi dari sasaran penyusunan Rancangan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2. mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang signifikan sekaligus mencegah diulangi dan diperluasnya kejahatan tersebut
3. meningkatkan koordinasi penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
4. meningkatkan penerimaan negara melalui penyitaan dan perampasan hasil kejahatan
5. memenuhi dan mengikuti standard internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam "*Revised 40+9 FATF Recs*" serta ketentuan *anti-money laundering regime* yang berlaku secara internasional (*international best practice*).

Beberapa hal yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : perumusan delik yang lebih sederhana dengan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Penuntut Umum tidak perlu membuat dakwaan secara subsider berlapis dari huruf a sampai dengan huruf g. Rumusan itu terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Ketiga pasal ini merumuskan tindak pidana dengan cara yang lebih sederhana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah melakukan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya disempurnakan juga kriminalisasi perbuatan yang terkait dengan pencucian uang yaitu : setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.²⁹ Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan

²⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 10

dalam rangka pelaksanaan tugasnya tidak menjaga kerahasiaan dokumen atau keterangan yang diwajibkan kerahasiaannya.³⁰

Revisi yang berikutnya adalah mengenai pelaporan dan pengawasan kepatuhan yaitu membuat perluasan pihak pelapor (*reporting parties*) hingga mencakup penyedia barang/jasa (*designated non-financial business*) dan profesi tertentu (*profession*).

Seiring dengan ketentuan *FATF revised 40+9 recommendations*, maka pihak pelapor perlu diperluas hingga mencakup penyedia barang dan/atau jasa lainnya seperti perusahaan properti/agen properti, dealer mobil, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.

Dengan adanya perluasan pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan akan semakin memperbanyak jumlah pelaporan, volume *data base* bertambah, dan bahan analisis semakin kaya/luas. Pada akhirnya hasil analisis secara optimal dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sehubungan dengan ketentuan pelaporan ini, ditentukan bahwa yang penting untuk dilaporkan oleh pihak pelapor adalah informasi yang berkaitan dengan :

- a. Pengukuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dimaknai sebagai *Customer Due Diligence* (CDD)
- b. Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda utasi atau pengalihan aset.
- c. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi administrasi

Selanjutnya, yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pengaturan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia.

Kontrol terhadap pembawaan uang tunai termasuk hingga mencakup *Bearer Negotiable Instrument* (BNI) ke dalam atau ke luar wilayah pabean

³⁰ *Ibid.*, Pasal 11

Indonesia, hal ini bukan hanya dalam konteks menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah dan mencegah internasionalisasi mata uang rupiah, tetapi juga sangat penting dalam konteks pencegahan dan pemberantasan TPPU.³¹

Penataan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga meliputi :

- a. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (*Multi Investigator*)
- b. Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi.
- c. Pengembangan kerjasama dan koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengembangan kerjasama dan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini juga merupakan salah satu pilar terpenting di dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia dan merupakan prasyarat utama di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penyempurnaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk menghancurkan penggunaan uang hasil kejahatan (hilir), sehingga diharapkan dengan demikian akan menghancurkan juga tindak kejahatan pokok di hulunya, seperti kejahatan narkotik, korupsi, penyelundupan senjata, perdagangan wanita dan anak-anak serta judi.³²

3. Trafficking Sebagai *Predicate Crime* Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang terkait erat dengan fondasi perdagangan manusia. Pertama, Ketidakstabilan ekonomi dan politik, diidentifikasi sebagai salah satu faktor pendorong penyebab kerentanan dan gerakan perdagangan orang. Pencucian uang digunakan sebagai tindakan untuk keuntungan pribadi

³¹ Naskah Akademik, *op.cit.*, hal. 41

³² Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005, hal. 4

pelaku perdagangan orang dalam upaya mencuci dan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dalam lembaga keuangan domestik maupun lintas batas.³³ Pola tujuan dari pelaku perdagangan orang (*human trafficking*) sama dengan pola tujuan dari pelaku kejahatan pencucian uang yaitu berupaya untuk menyembunyikan sumber tidak sah dari harta kekayaannya dan pada akhirnya nanti dapat dinikmati sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah/legal.

Kedua, adalah pemanfaatan layanan keuangan domestik dan lintas batas sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan perdagangan orang. Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan/*predikat crime* dari tindak pidana pencucian uang.³⁴

Dalam setiap tindak pidana, setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Demikian halnya dengan perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan maka komponennya yaitu *trafficker* selaku pelaku tindak pidana, *human trafficking* sebagai perbuatan pidana dan uang sebagai hasil dari tindak pidana.

Selama ini banyak kejahatan perdagangan orang yang tidak dapat dibuktikan tindak pidananya atau banyak kasus yang tidak bisa ditindak dengan pidana karena sulitnya pembuktian. Banyak kasus yang masuk ke kepolisian tetapi tidak dapat dilanjutkan dengan penuntutan karena kurangnya alat bukti, korban yang tidak mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum karena takut atau malu.

Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai metode pendekatan *follow the money* yaitu yang mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil tindak pidana diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang dicurigai merupakan tindak pidana, maka dapat dilakukan penelusuran terhadap segala

³³ Karen E. Bravo, *op.cit*, hal. 20

³⁴ *ibid*

kemungkinan teknik-teknik yang dipakai sebagai mekanisme pencucian uang dan membandingkan dana yang ada dengan kredibilitas orang pribadi, maupun korporasi.

Kenyataan bahwa perdagangan orang dapat dilakukan oleh PJTKI/PPTKIS, maka pemerintah harus bisa mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan/penyelenggaraan wewenang PJTKI/PPTKIS tersebut. Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan itu dapat dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan perusahaan, misalnya dicurigai PJTKI melakukan pencucian uang, maka dapat dilakukan penelusuran keuangan PJTKI yang bersangkutan dan dibandingkan dengan kredibilitas perusahaan tersebut selama ini, dengan memperhatikan kemungkinan tipologi pencucian uang yang dapat dilakukan. Jika dari kondisi keuangannya ada indikasi pencucian uang, maka selanjutnya dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal untuk menilai *predicate crime* yang dilakukan oleh PJTKI tersebut.

Karen E. Bravo dalam tulisannya menyatakan bahwa :

*“the purpose of anti-money laundering efforts is the identification and confiscation of the proceeds of the underlying predicate crimes. By locating the funds and confiscating them, law enforcement and state authorities can strengthen criminal prosecutions of accused suspects, identify sources of compensation for crime victims, and locate and secure, through confiscation, additional funds for law enforcement activities through forfeiture proceedings”*³⁵

Dari tulisan itu dapat dilihat bahwa yang pertama dilakukan adalah identifikasi dan penyitaan terhadap hasil dari suatu tindak pidana, selanjutnya dari hasil penelusuran dan identifikasi hasil tindak pidana tersebut akan didapatkan *predicate crimenya*. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan pendekatan analisis keuangan (*financial analysis*)³⁶ yaitu

³⁵ Karen E. Bravo, *op.cit*, hal. 15

³⁶ Yunus Husein, *Follow The Money vs Follow The Suspect*, Harian Seputar Indonesia (Sindo) <http://wordpress.com/> diakses tanggal 25 Agustus 2012.

penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan analisis transaksi mencurigakan.

4. Pemberantasan *Trafficking* melalui Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tujuan upaya anti pencucian uang adalah identifikasi dan penyitaan hasil kejahatan (*predikat crime*) yang mendasarinya. Dengan mendapatkan dan menyita dana, penegak hukum dan otoritas negara dapat melakukan penuntutan tindak pidana asal yang telah dilakukan oleh para pelaku, mengidentifikasi sumber kompensasi bagi korban kejahatan.³⁷ Menerapkan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui :

a. Penerapan Prinsip dalam Sistem Keuangan untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Financial analysis (analisis keuangan) berusaha melihat transaksi dan keadaan keuangan pelaku untuk menjawab beberapa pertanyaan pokok: Apa transaksi yang dilakukan dan apa voucher atau warkat transaksi yang digunakan? Siapa yang melakukan transaksi? Atas nama siapa transaksi dilakukan? Mengapa transaksi dilakukan? Di mana dan kapan transaksi dilakukan? Bagaimana terjadinya transaksi?

Pendekatan *follow the money* dapat dilakukan pelacakan ke belakang untuk mengetahui sumber dana. Demikian juga pelacakan ke depan untuk mengetahui siapa lawan transaksi, yang menerima atau menikmati hasil transaksi tersebut.³⁸ Pelacakan dapat dilakukan semaksimal mungkin, sesuai kebutuhan untuk mencari adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan seseorang. Demikian juga dengan menganalisa aliran dana dan transaksi maka akan dapat diungkapkan bentuk tindak pidana dan pelakunya.

³⁷ Karen E. Bravo, *op.cit*, hal. 16

³⁸ Yunus Husein, *Follow The Money vs Follow The Suspect.*, *loc.cit.*,

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui penegakan hukum dalam bidang pencucian uang, haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kebijakan yang diambil tidak cukup jika hanya bersifat fragmentaris, parsial dan represif, tetapi harus menggunakan pendekatan terpadu/strategis yang integral.³⁹

Mengingat pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana pencucian uang menggunakan sistem keuangan dalam pola perbuatannya, maka kerjasama yang baik dan efektif diantara berbagai pihak yaitu aparat penegak hukum dan Penyedia Jasa Keuangan, dapat menjadi sebagai alat untuk mengejar hasil kejahatannya.

Analisis keuangan (*financial analysis*) dapat dilakukan dengan adanya Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dan adanya sistem pelaporan atas indikasi transaksi mencurigakan. Kedua sistem ini dapat digunakan dalam upaya pembuktian adanya tindak pidana pencucian uang yang telah dilakukan, sehingga pada akhirnya nanti dapat ditemukan pelaku tindak pidana dan menemukan *predicate crimenya*.

Tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai ancaman eksternal terhadap bank. Dalam hal ini, cara terbaik bagi bank untuk melindungi diri dari ancaman tersebut adalah berupaya memahami dan mengenal sebaik mungkin setiap nasabahnya berikut kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh nasabah berhubungan dengan aktivitas rekeningnya. Cara ini akan menjadi perisai utama bagi bank untuk mencegah agar bank jangan sampai dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan yang berkedok sebagai nasabah untuk menjalankan kegiatan pencucian uang.⁴⁰ Konsep ini yang mendasari prinsip mengenali pengguna jasa dalam sistem keuangan.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 29

⁴⁰ Yunus Husein, "*Kebijaksanaan Bank Indonesia Tentang Pencucian Uang (Money Laundering)*," http://yunushusein.files-wordpress.com/2007/07/27_kebijaksanaan-bank-indonesi_yh_x.pdf, diakses pada tanggal 9 September 2012.

b. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, istilah yang dipakai mengalami perubahan yaitu menjadi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dimaknai sebagai *Customer Due Diligence* (CDD), sebagai salah satu upaya untuk mencegah agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak cara langsung oleh para pelaku kejahatan.

Prinsip mengenali pengguna jasa ini sebelumnya dikenal dengan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. Undang-undang ini diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Untuk penerapan prinsip mengenali pengguna jasa, bank wajib menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal pengguna jasa.⁴¹

Dalam sistem pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa, hal ini dilakukan dengan pemikiran bahwa setiap hasil kejahatan pasti akan selalu menggunakan kerumitan dalam sistem keuangan dalam upaya penyamaran atau pengaburan asal usul harta kekayaannya,

Peraturan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini juga merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, karena dapat mengidentifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan

⁴¹Adrian Sutedi, *op.cit.*, hal 150

transaksi nasabah juga kebijakan dan prosedur manajemen resiko. Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa membantu bank untuk mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transactions*) dan selanjutnya melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).

Semakin besarnya kegiatan usaha perbankan dan dengan adanya persaingan dalam perkembangan usaha perbankan, maka akan semakin banyak resiko yang akan dihadapi oleh bank baik itu resiko reputasi, resiko operasional, resiko hukum, dan resiko terkonsentrasinya transaksi. Memperhatikan hal ini maka bank wajib melindungi dirinya dengan penerapan prinsip mengenal Nasabah secara efektif.

Resiko reputasi berhubungan dengan hal-hal yang berpotensi mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank tertentu, dalam hal ini penilaian masyarakat dapat berpengaruh pada integritas bank. Resiko operasional merupakan resiko kerugian yang secara langsung atau tidak langsung bersumber dari internal maupun eksternal bank. Resiko hukum berkaitan dengan kemungkinan bank menjadi target pengenaan sanksi karena tidak dipatuhinya standar prinsip mengenal nasabah. Dalam hal ini bank akan mendapat sanksi baik itu sanksi administratif maupun sanksi denda dari otoritas pengawas bank maupun sanksi pidana.

Sanksi konsentrasi berkaitan dengan posisi aktiva dan passiva dalam bank. Dalam praktek pengawasan, pengawas bank tidak hanya berkepentingan pada sistem informasi untuk mengidentifikasi konsentrasi kredit yang dijalankan oleh bank, tetapi juga penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menyalurkan kredit pada seseorang ataupun terhadap group kreditor. Tanpa adanya penerapan prinsip mengenal nasabah yang baik maka akan sulit bagi bank mengatasi resiko konsentrasi yang dimaksud. Kemudian di sisi passiva, resiko konsentrasi berkaitan dengan resiko adanya penarikan dana, khususnya penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar.

Dalam perkembangannya pemerintah kemudian juga mengeluarkan peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah baik di Bank Perkreditan

Rakyat (BPR), Lembaga Non Bank, Pasar Modal dan Perdagangan valuta Asing. Hal ini diatur dengan PBI No. 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), PBI No. 6/1/2004 tentang Pedagang Valuta Asing, Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 45/KMK.06/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Semua kebijakan itu bertujuan untuk meminimalisasi ruang gerak para pelaku pencucian uang. Kejahatan pencucian uang digunakan oleh para pelaku agar dapat menikmati uang "yang seolah-olah" bersih dengan bantuan Lembaga Keuangan maupun Lembaga Non Keuangan.

Dengan menggunakan prinsip mengenal pengguna jasa ini dapat dilakukan identifikasi terhadap orang pribadi maupun terhadap perusahaan jasa penyalur tenaga kerja Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun yang melintasi batas teritorial Indonesia, sehingga akan mempersulit pengguna jasa untuk melakukan manipulasi terhadap identitas pribadi/perusahaan, demikian juga terhadap transaksi keuangannya.

c. Transaksi Keuangan Mencurigakan

Istilah transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*) pertama sekali digunakan dalam *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setiap negara mempunyai istilah yang berbeda, bukan hanya "transaksi yang mencurigakan", tetapi ada juga yang menggunakan istilah "transaksi yang menyimpang dari kebiasaan" atau "*unusual transaction*".

Ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yaitu sebagai berikut : Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajiban, dan di luar kebiasaan dan kewajiban

aktivasi transaksi nasabah. Dalam hal penanganan transaksi mencurigakan, maka ada pertanyaan-pertanyaan pokok yang dapat digunakan untuk menganalisa transaksi tersebut, yaitu⁴²

- 1) Apakah jumlah nominal dan frekuensi transaksi konsisten dengan kegiatan nominal yang selama ini dilakukan oleh nasabah/pengguna jasa?
- 2) Apakah transaksi yang dilakukan wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha, aktivitas dan kebutuhan nasabah/pengguna jasa
- 3) Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenisnya?
- 4) Apabila transaksi yang dilakukan sifatnya internasional, apakah nasabah memiliki alasan yang kuat untuk menjalin usaha dengan pihak di luar negeri?
- 5) Apakah nasabah melakukan transaksi dengan nasabah yang tergolong dalam nasabah beresiko tinggi (*high risk customer*)?

Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafficking*) melalui prinsip mengenal Pengguna Jasa dan metode pendekatan melalui transaksi mencurigakan dalam sistem keuangan dalam sektor keuangan maupun non keuangan. Pengefektipan kedua metode ini dapat menghindarkan lembaga keuangan dan non keuangan dimanfaatkan sebagai media untuk membersihkan uang kotor yang didapatkan pelaku dari tindak pidana perdagangan orang.

Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dapat dilakukan dengan adanya kerjasama penyedia jasa keuangan, penyedia barang/jasa dengan pihak pengawas perusahaan jasa penyalur tenaga kerja, dengan memperbandingkan transaksi keuangannya dengan kredibilitas dan tingkat kegiatan dari orang pribadi/perusahaan dalam melakukan kewenangannya

⁴² Bismar Nasution, *op.cit.*, hal. 48

d. Penerapan Perluasan Pihak Pelapor

Dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang membuat perluasan pihak pelapor sesuai dengan tuntutan FATF dimana mensyaratkan perluasan pihak pelapor, yaitu dengan memasukkan bidang profesi sebagai pihak yang wajib melapor tentang adanya dugaan tindak pidana pencucian uang ini. Pihak pelapor ditetapkan pada Pasal 17 yaitu :

1. Penyedia Jasa Keuangan : bank, perusahaan pembiayaan, asuransi dan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manager investasi, kustodian, wali amanat, perposan, pedagang valas, penyelenggara e-money dan/atau pembayaran menggunakan kartu, koperasi simpan pinjam, pegadaian, perusahaan perdagangan berjangka, komoditas, atau penyelenggaraan kegiatan usaha pengiriman uang.
2. Penyedia barang dan/atau jasa lain : meliputi perusahaan proferti/agen proferti, pedagang kendaraan bermotor, permata, dan perhiasan/logam mulia, barang seni dan antik, atau balai lelang.

Demikian juga dengan kewajiban melapor bagi pribadi orang yang membawa uang ke dan dari luar negeri Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Ditjen Bea dan Cukai, selanjutnya Ditjen Bea dan Cukai melaporkan informasi tersebut kepada PPATK.

Dengan semakin bertambahnya pihak sebagai pelapor, maka akan semakin mempersempit ruang gerak bagi pelaku pencucian uang, yang merupakan tindakan lanjutan dari tindak pidana asal. Dengan adanya perluasan pihak-pihak yang memiliki kewajiban pelaporan akan semakin memperbanyak jumlah pelaporan, volume *data base* bertambah, dan bahan analisis semakin kaya/luas. Pada akhirnya hasil analisis secara optimal dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Demikian juga halnya dalam upaya memberantas tindak pidana *trafficking* dengan adanya ketentuan perluasan pihak pelapor ini, dapat mempersempit ruang gerak para *trafficker*. Pelaku yang selama ini hanya berhadapan dengan pihak kepolisian dan kejaksaan pada tingkat penyelidikan

dan penyidikan, kemudian seringkali mereka berhasil meloloskan diri. Dengan adanya ketentuan perluasan pihak pelapor ini maka kejahatan mereka dapat terdeteksi dari aliran dana baik melalui penyedia jasa keuangan maupun penyedia barang/jasa, demikian juga dengan direktorat Bea dan Cukai.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Prinsip-prinsip dalam sistem keuangan yaitu prinsip mengenali pengguna jasa dan identifikasi transaksi mencurigakan dapat digunakan untuk mengetahui adanya suatu kejahatan yang dilakukan. Pengungkapan tindak pidana perdagangan orang dengan pendekatan pencucian uang dilakukan penelusuran transaksi keuangan atau aliran dana (*follow the money*). Hal ini dimungkinkan karena tindak pidana perdagangan orang menghasilkan dana yang besar dan para *trafficker* akan menggunakan/memanfaatkan analisis keuangan (*financial analysis*) dalam transaksi perputaran dana hasil kejahatan tersebut. Terlebih lagi dengan adanya perluasan pihak pelapor, yaitu dengan memasukkan pedagang kendaraan bermotor, permata dan perhiasan/logam mulia, demikian juga dengan adanya ketentuan pelapor pribadi orang yang membawa uang tunai ke dalam atau ke luar pabean Indonesia. Semakin kompleks sarana yang dapat dimanfaatkan melalui pendekatan pencucian uang ini tentunya mempersempit celah yang dapat digunakan para pelaku perdagangan orang untuk melakukan kejahatannya. Tujuan utama pendekatan pencucian uang adalah dana yang dihasilkan dari tindak pidana perdagangan orang, dan selanjutnya dengan kerjasama dengan penyidik kepolisian dapat diteruskan untuk menyidik tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*)

2. Saran

- a. Dalam Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam penerapan prinsip-prinsip dalam sistem keuangan agar dapat diatur lebih

jelas lagi tentang ketentuan mengenal pengguna jasa karena selama ini dipakai Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan prinsip Mengetahui Nasabah (*know your customers principles*), sedangkan dalam undang-undang ini sudah menggunakan Prinsip Mengetahui Pengguna Jasa.

- b. Diharapkan percepatan dalam melengkapi perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga fungsi dari undang-undang ini sebagai tindak pidana spesialis yang bersifat *preventive measure* dan *repressive measures* dapat dilaksanakan secara maksimal. Koordinasi yang baik antara penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, PPATK dan aparat penegak hukum dalam tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang pada akhirnya nanti dapat menekan dan memberantas tindak pidana asal dalam tulisan ini secara spesifik tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Akademik, Naskah RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2006
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, 1995
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusa Media, 2009
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Perssindo, 1983.
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus Pencucian Uang Di Indonesia (Money Laundering)*, Malang: Setara Pres, 2011
- Irman S. Tb., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, Bandung: MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006
- Juwana, Hikmahanto, *Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Pusat Kajian Hukum), 2005
- Luhulima, Achie Sudiarti, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007
- Madinger, John and Sydney A. Zalopany, *Money Laundering A Guide For Criminal Investigators*, United State: CRC Press LLC, 1999
- Mattalatta, Andi, *"Santunan Bagi Korban," Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, 1987
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *"Bab-bab Tentang Penemuan Hukum"*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993

- Nasution, Bismar, *Rejim Anti Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: BookTerrace & Library, 2008
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Sapardjaja, Komariah Emong, “*Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Alumni, 2002
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorism*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004
- Soekanto, Soerjono, “*Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*”, Jakarta: UI-Press, 1983
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008
- Syamsudin, M., “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Tongat, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesi Dalam Perspektif Pembaharuan*”, Malang: UMM Press, 2009
- Utrecht, “*Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*”, Surabaya: pustaka Tinta Mas, 2000
- Weda, Made Darma, “*Kriminologi*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

2. Tulisan

- Bravo, Karen E., “*Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries for Freedom*,” Article, Westlaw: University of St. Thomas Law Journal, 2009
- Meier, Patricia J., “*Small Commodities : How Child Traffickers Exploit Children and Families in Intecountry Adoption and What The United State Must Do to Stop Them*,” Westlaw: Journal of Gender, Race and Justice, 2008
- Husein, Yunus, “*Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*”, http://yunushusein.files-ordpress.com/2007/07/12_penegahan_pemberantasan-tppu-di-indonesia_x.pdf diakses tanggal 6 September 2012

-----, *Follow The Money vs Follow The Suspect*, Harian Seputar Indonesia (Sindo) <http://wordpress.com/> diakses tanggal 25 Agustus 2012

-----, “Kebijaksanaan Bank Indonesia Tentang Pencucian Uang (Money Laundering),” [http://yunushusein.files-wordpress.com/2007/07/27 kebijakan-bank-indonesi_yh_x.pdf](http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/27_kebijakan-bank-indonesi_yh_x.pdf), diakses pada tanggal 9 September 2012

Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah, disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.